

## **PENGARUH PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Rudy Badrudin<sup>1</sup>  
Mufidhatul Khasanah<sup>2</sup>

### **Abstract**

*This research analyzed the influence of local government policy in managing local budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) which in public budget allocating in education, health, and infrastuctur for human developing in DIY Province based on the data of year 2004 to 2008. The method used to analyze the hypotheses was the regression analysis ( $\alpha = 5\%$ ). The results showed that had no significant effect on education, health, and infrastuctur for human development using time lag 2 and 3 years.*

*Keywords: local budget, human development index*

### **PENDAHULUAN**

Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat tergantung komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang. Pembangunan tiga aspek yang menjadi fokus perhatian dalam penghitungan IPM tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan sinergi di antara ketiganya. Peran pemerintah sebagai penyusun kebijakan sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Anand, 1993). Pentingnya peran tersebut tidak terlepas dari tiga fungsi pemerintah, yaitu memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri, menyelenggarakan peradilan, dan menyediakan barang-barang yang tidak mampu disediakan oleh pihak swasta, seperti misalnya jalan, dam, dan sarana publik lainnya (Azril, 2000). Dalam perekonomian modern, peran pemerintah sebagaimana dikatakan Musgrave dikelompokkan menjadi tiga, yaitu peranan dalam alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Salah satu perangkat yang selama ini banyak digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan peran tersebut adalah perangkat kebijakan fiskal. Di antara instrumen kebijakan fiskal tersebut, ada instrumen dalam bidang pengalokasian dana atau anggaran pembangunan ke bidang yang berkaitan dengan dengan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, irigasi, transportasi, dan sebagainya (Sasana, 2009). Kaitan antara pengeluaran untuk sektor publik terhadap pembangunan manusia sebenarnya mudah untuk ditelusuri. Pengeluaran untuk bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup maupun menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai salah satu komponen dalam penentuan pembangunan manusia (Sahrah, 2007). Anggaran dalam bidang pendidikan akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu meningkatkan angka melek huruf. Anggaran dalam bidang infrastruktur diharapkan mampu

---

<sup>1</sup> Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, email: rudy.badrudin@stieykpn.ac.id

<sup>2</sup> Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, email : mufikhasandy@yahoo.com

meningkatkan akses masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga akan terjadi efisiensi dan pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi riil per kapita (Delavallade, 2006).

Mencermati alokasi pengeluaran pemerintah terhadap akses publik terjadi kondisi yang cukup memprihatinkan. Hal tersebut tampak dari masih relatif tingginya alokasi anggaran belanja rutin dibanding anggaran belanja pembangunan, baik dalam skala nasional maupun regional. Khusus mengenai alokasi pengeluaran pendidikan, rencana alokasi 20% untuk anggaran pendidikan masih jauh dari realita (Suparto, 2005). Masih relatif rendahnya komitmen pemerintah terhadap akses publik juga terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebagai bukti, dari total pendapatan daerah sebesar Rp704,75 milyar pada tahun 2006, lebih kurang sebesar 60% digunakan untuk anggaran belanja rutin (Khasanah, 2007).

Selama ini, IPM di Provinsi DIY yang sudah mencapai 73,5 pada tahun 2005, jauh di atas rata-rata IPM Indonesia yang pada tahun sama hanya sebesar 69,6. Provinsi DIY menempati rangking 4 dari seluruh provinsi di Indonesia dalam bidang pembangunan manusia. Hal ini diperkuat oleh besaran IPM di Kota Yogyakarta yang selama ini menempati nilai tertinggi dari seluruh kota/kabupaten di Indonesia dengan besaran 77,7.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD yang tercermin melalui alokasi pengeluaran publik seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pembangunan manusia di Provinsi DIY. Manfaat penelitian yang diharapkan adalah untuk mengetahui adanya keterkaitan antara pengeluaran pemerintah pada bidang sektor publik dalam APBD dengan tingkat pembangunan manusia di Provinsi DIY; untuk mengetahui komitmen pemerintah daerah di Provinsi DIY dalam proses pembangunan manusia yang tercermin melalui alokasi pengeluaran pembangunan melalui APBD sektor publik untuk masing-masing daerah di Provinsi DIY.

## METODE PENELITIAN

Dilihat dari komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang tercermin melalui alokasi APBD terhadap sektor publik yang dalam penelitian ini diproksi dengan alokasi pengeluaran pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tampak masih terjadi ketidakkonsisten pemerintah khususnya bidang pendidikan (Suhab, 2004). Ketidakkonsistenan pemerintah tersebut ditunjukkan oleh besaran pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan yang terlihat naik turun dari tahun ke tahun baik secara absolut maupun relatif terhadap seluruh pengeluaran (Fery, 2002).

Tabel 1  
Alokasi Anggaran APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Rp000,-)

Tahun	Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Bidang Infrastruktur	
1997	3.953.568	7,60%	2.246.518	4,47%	7.381.619	14,68%
1998	4.148.481	9,60%	1.933.864	4,47%	7.209.922	16,68%
1999	7.265.535	13,17%	4.798.812	9,05%	6.922.611	13,06%
2000	10.034.176	12,33%	8.840.026	10,86%	5.698.619	7,00%
2001	2.252.015	4,15%	2.400.403	4,42%	4.285.559	7,89%
2002	16.158.297	19,95%	4.062.471	5,02%	13.047.949	16,11%

Sumber: BPS. *Laporan Keuangan Provinsi DIY, Tahun 2005*. Data diolah.

Porsi anggaran kedua bidang tersebut masih tergolong kecil, padahal kedua bidang tersebut justru sangat erat terkait dengan proses pembangunan manusia itu sendiri. Sebagaimana diketahui komponen perhitungan IPM yang terdiri atas 3 komponen meliputi pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita. Dua komponen yang mendominasi perhitungan indeks tersebut dan selama ini diyakini besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan manusia justru mendapat jatah alokasi anggaran relatif kecil. Apalagi dibandingkan dengan anggaran bidang infrastruktur yang dalam penelitian ini diproksi dengan alokasi anggaran infrastruktur bidang transportasi. Berdasarkan kondisi tersebut terlihat bahwa pemerintah daerah belum memiliki aturan yang jelas dan pasti tentang besaran anggaran pendidikan yang selama ini diyakini memiliki andil besar dalam pembangunan manusia (Wibowo, 2008). Besarnya angka IPM di Provinsi DIY dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2  
Indeks Pembangunan Manusia di wilayah DIY, Tahun 1998-2005

Tahun	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Provinsi DIY	67,9	68,7	69,4	70,1	70,8	71,8	72,9	73,5
Kulon Progo	65,9	66,4	67,4	68,4	69,4	69,9	70,9	71,5
Gunungkidul	65,1	65,8	66,6	67,3	68,4	9,4	71,5	71,9
Bantul	62,7	63,6	64,7	65,8	67,1	68,1	68,8	69,3
Sleman	69,3	70,1	71,1	72,1	73,1	74,4	75,1	75,6
Yogyakarta	72,1	73,4	74,3	74,9	75,3	76,1	77,4	77,7

Sumber: BPS, *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman, Tahun 2006*.

Secara keseluruhan, IPM di Provinsi DIY mengalami peningkatan selama tahun 1999-2005. Dilihat dari tingkat besarnya, Yogyakarta memiliki nilai tertinggi, bahkan angka tersebut merupakan angka tertinggi Indonesia. Hal ini dapat dimengerti karena Yogyakarta merupakan pusat kegiatan pendidikan dan dikenal sebagai kota pendidikan. Tingginya angka tersebut sangat erat terkait dengan peningkatan yang terjadi di Provinsi DIY baik meliputi peningkatan angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi per kapita, maupun indeks pendidikan yang selama ini digunakan sebagai komponen perhitungan IPM.

Tabel 3  
Indikator IPM Propinsi DIY, Tahun 2002-2005

No	Keterangan	2002	2003	2004	2005
KOMPONEN IPM					
1	Angka harapan hidup (tahun)	72,56	72,68	72,70	72,70
2	Angka melek huruf(%)	88,55	90,87	89,70	90,50
3	Rerata lama sekolah (tahun)	9,7	9,7	9,8	10,1
4	Konsumsi riil per kapita (Rp.000,-)	612,4	616,9	638,0	639,1
IPM					
1	Harapan hidup	79,33	79,43	79,50	79,50
2	Pendidikan	80,6	82,14	81,58	82,71
3	Pendapatan	58,33	59,29	64,24	64,49
	IPM	72,76	73,62	75,11	75,57

Sumber: BPS, *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman, Tahun 2006*.

Dilihat dari capaian IPM di Provinsi DIY, dapat dikatakan bahwa nilai tersebut merupakan capaian yang cukup bagus. Namun, kalau dihubungkan dengan

data sebelumnya tentang alokasi pengeluaran pemerintah untuk masing-masing sektor memang ada keganjilan yang patut dipertanyakan. Melihat perkembangan anggaran masing-masing sektor yang memiliki turbulensi yang sangat tinggi dan sangat tidak pasti tingginya, maka IPM tersebut patut dicermati (Hirawan, 2007). Berdasarkan kedua data tersebut dapat dikatakan bahwa dua kondisi yang saling berlawanan yaitu rendahnya komitmen pemerintah terhadap upaya pembangunan manusia terutama yang dicerminkan melalui rendahnya anggaran di sektor publik dan tingginya kesadaran masyarakat Provinsi DIY terhadap pentingnya pembangunan manusia terutama di bidang pendidikan (Badrudin, 2010).

Didasari pemikiran adanya hubungan antara IPM dengan pengeluaran pemerintah melalui APBD dimunculkan formulasi hubungan sebagai berikut:

$$IPM = f(APBD)$$

$$IPM = f(PP_{pd}, PP_{ks}, PP_{inf}) \dots \dots \dots (1)$$

Hubungan antarvariabel merupakan hubungan yang memiliki *lag time* dengan masing-masing variabel bebas memiliki tenggang waktu pengaruh sebesar dua tahun (t-2) dan tiga tahun (t-3), sehingga formulasi hubungan yang baru adalah (Gujarati, 1995:6-19).

$$IPM_{it} = f(PP_{pdit-2}, PP_{pdit-3}, PP_{ksit-2}, PP_{ksit-3}, PP_{infrit-2}, PP_{infrit-3})$$

Hubungan antarvariabel penjelas tersebut dibentuk dengan fungsi non linear atau lebih dikenal sebagai fungsi Cobb Douglas yang diformulasikan sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 PP_{pdit-2}^{\beta_1} PP_{pdit-3}^{\beta_2} PP_{ksit-2}^{\beta_3} PP_{ksit-3}^{\beta_4} PP_{infrit-2}^{\beta_5} PP_{infrit-3}^{\beta_6} + \mu_{it} \dots (2)$$

Keterangan:

$IPM_{it}$  = IPM masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY pada tahun tertentu

$PP_{pd}$  = Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan

$PP_{ks}$  = Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan

$PP_{inf}$  = Pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur

$PP_{pdit-2}$  = Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan pada 2 tahun sebelumnya

$PP_{pdit-3}$  = Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan pada 3 tahun sebelumnya

$PP_{ksit-2}$  = Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan pada 2 tahun sebelumnya

$PP_{ksit-3}$  = Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan pada 3 tahun sebelumnya

$PP_{infrit-2}$  = Pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur 2 tahun sebelumnya

$PP_{infrit-3}$  = Pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur 3 tahun sebelumnya

$\mu$  = Variabel pengganggu

$i$  = Masing-masing kabupaten.kota di Provinsi DIY

$t$  = Tahun pengamatan

Pengamatan dilakukan berdasarkan data di lima kabupaten di Provinsi DIY yang terdiri dari Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Yogyakarta dan dilakukan pengamatan selama 4 tahun.

## ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh data sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln Y = & \ln 4,505 + 0,0146 \ln PP_{peit-2} - 0,0151 \ln PP_{peit-3} + 0,0192 PP_{ksit-2} + 0,0105 PP_{ksit-3} \\ & - 0,0410 \ln PP_{inf_{it-2}} - 0,0021 \ln PP_{inf_{it-3}} \mu_{it} \end{aligned}$$

Tabel 4  
Hasil Pengujian Model

Variabel	PPpe <sub>it-2</sub>	PPpe <sub>it-3</sub>	PPks <sub>it-2</sub>	PPks <sub>it-3</sub>	PPinf <sub>it-2</sub>	PPinf <sub>it-3</sub>
Nilai prob.	(0,4134)	(0,3991)	(0,1901)	(0,4346)	(0,0607)	(0,9228)
Ttes	(0,8330)	(-0,859)	(1,350)	(0,795)	(-1,972)	(-0,0979)

R<sup>2</sup> 0,2149

F prob. 0,4200

Sumber: Hasil perhitungan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh beberapa temuan sebagai berikut, yaitu 1) nilai koefisien pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dua tahun sebelumnya (Ppe<sub>it-2</sub>) sebesar 0,0146, yang artinya apabila terjadi peningkatan anggaran pendidikan sebesar 1%, maka mengakibatkan terjadinya peningkatan IPM di wilayah DIY untuk dua tahun kemudian sebesar 0,0146%, ceteris paribus; 2) nilai koefisien pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tiga tahun sebelumnya (Ppe<sub>it-3</sub>) sebesar -0,1519, yang artinya: Apabila terjadi peningkatan anggaran pendidikan sebesar 1%, maka akan mengakibatkan terjadinya penurunan IPM di Provinsi DIY untuk tiga tahun kemudian sebesar 0,15196%, ceteris paribus; 3) nilai koefisien pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dua tahun sebelumnya (PPks<sub>it-2</sub>) sebesar 0,0192, yang artinya apabila terjadi peningkatan anggaran pendidikan sebesar 1%, maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan IPM di Provinsi DIY dua tahun kemudian sebesar 0,0192%, ceteris paribus; 4) nilai koefisien pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dua tahun sebelumnya (PPks<sub>it-3</sub>) sebesar 0,0105, yang artinya apabila terjadi peningkatan anggaran kesehatan sebesar 1%, maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan IPM di Provinsi DIY tiga tahun kemudian sebesar 0,0105%, ceteris paribus; 5) nilai koefisien pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur bidang transportasi dua tahun sebelumnya (PPinf<sub>it-2</sub>) sebesar -0,040 yang artinya apabila terjadi peningkatan anggaran pendidikan sebesar 1%, maka mengakibatkan terjadinya penurunan IPM di Provinsi DIY dua tahun kemudian sebesar 0,040%, ceteris paribus; dan 6) nilai koefisien pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur tiga tahun sebelumnya (Ppe<sub>it-2</sub>) sebesar -0,00218, yang artinya apabila terjadi peningkatan anggaran pendidikan sebesar 1%, maka akan mengakibatkan terjadinya penurunan IPM di Provinsi DIY

Alokasi anggaran infrastruktur untuk semua wilayah provinsi dan kabupaten/kota menempati porsi relatif besar dibanding alokasi anggaran lainnya. Hal tersebut memang sejalan dengan program-program pemerintah di negara berkembang yang pada umumnya lebih menekankan pembangunan pada program-program fisik karena dianggap lebih mudah dilihat hasilnya daripada program-program yang membutuhkan proses panjang dalam keberhasilannya meskipun pilihan kebijakan itu secara tidak langsung telah mengurangi hak masyarakat terhadap alokasi sektor publik lainnya yang lebih mendukung pada peningkatan pendidikan dan kesehatan dan muaranya pada peningkatan pembangunan manusia. Kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam peningkatan pada akses keluar seperti mobilitas penduduk, sarana pemasaran, akses ke dunia/wilayah lain. Akan tetapi yang juga harus dipahami bahwa kebijakan tersebut juga berpengaruh terhadap sosial ekonomi dan budaya masyarakat, seperti pola konsumsi tinggi maupun pergeseran sistem nilai dalam masyarakat. Berdasarkan hal itu, proses perubahan pembangunan manusia terjadi secara bersama-sama, baik peran pemerintah maupun masyarakat. Hal tersebut disadari atau tidak akan mampu menurunkan kadar *sense of education* pada masyarakat Provinsi DIY yang selama ini dikenal cukup

tinggi dan kemungkinan bergeser ke arah masyarakat metropolis yang memiliki *sense of consume* untuk produk di luar pendidikan.

Pengujian statistik dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji signifikansi parsial dan uji signifikansi serempak yang didasarkan pada derajat kepercayaan ( $\alpha$ ) sebesar 5%. Berdasarkan hasil perhitungan dengan derajat kepercayaan sebesar 5%, semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tidak ada satupun yang mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel dependen dan variabel independen secara statistik. Pengujian serempak (uji F) yang dilakukan, menunjukkan bahwa ternyata semua variabel secara serempak tidak merupakan penjelas terhadap variabel dependen.

Koefisien determinasi adalah koefisien yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat kemampuan model dapat digunakan untuk menerangkan variasi variabel terikat. Hasil pengujian pada penelitian ini pada simulasi yang menggunakan *time lag* 2 dan 3 tahun adalah sebesar 0,2149 yang artinya model yang digunakan hanya mampu menjelaskan keterikatan variasi variabel sebesar 21%, sisanya yang sebesar 79% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar pengamatan.

Angka tersebut merupakan angka yang sangat kecil mengingat variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini ada sejumlah 6 variabel. Selain itu model yang digunakan juga selama ini banyak digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel yang sejenis. Dengan kata lain, berdasarkan pengamatan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pembangunan manusia memiliki karakteristik yang cukup unik karena keberadaannya justru dipengaruhi oleh variabel-variabel di luar pengamatan yang sebesar 79%. Namun demikian, temuan tersebut cukup sejalan dengan hasil uji statistik lain yaitu uji parsial maupun uji serentak yang sama-sama menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Temuan tersebut menjadi sangat menarik bukan saja karena kegagalan model menjelaskan hubungan antarvariabel, tetapi sangat berlawanan dengan keyakinan yang selama ini sudah berkembang baik dikalangan masyarakat awam maupun akademisi. Apalagi berbagai penelitian senada di wilayah lain baik dalam skala regional, nasional maupun internasional, selalu membuktikan adanya hubungan yang kuat antarvariabel pengamatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian, cukup banyak temuan menarik yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini. Di antara simpulan tersebut adalah sebagai berikut 1) variabel pengeluaran pemerintah di Provinsi DIY pada sektor pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi DIY baik dengan pengamatan waktu menggunakan *time lag* 2 dan 3 tahun; 2) variabel pengeluaran pemerintah di Provinsi DIY pada sektor kesehatan berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi DIY baik dengan pengamatan waktu menggunakan *time lag* 2 dan 3 tahun; 3) variabel pengeluaran pemerintah di Provinsi DIY pada sektor infrastruktur berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi DIY baik dengan pengamatan waktu menggunakan *time lag* 2 dan 3 tahun. 4) keberhasilan pembangunan manusia yang terjadi di DIY lebih banyak ditentukan oleh *sense of education* masyarakat yang dilakukan secara mandiri dan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kekuatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat itu mandiri. Apalagi dengan masyarakat yang sangat terbuka terhadap perubahan dari luar, membuat masyarakat Yogyakarta lebih peka terhadap tuntutan dari luar; 5) Pemerintah Provinsi DIY belum memiliki komitmen yang kuat terhadap upaya pembangunan manusia di wilayahnya. Rendahnya komitmen

pemerintah tersebut selain dibuktikan dengan rendahnya alokasi pengeluaran sektor publik yang menunjang pembangunan manusia baik secara absolut dan relatif, juga dibuktikan dengan nilai anggaran yang memiliki fluktuasi sangat tinggi dan tidak pasti.

Berdasarkan simpulan, saran yang dapat diberikan ini adalah 1) pemerintah harus memiliki aturan yang jelas dan kepastian tentang besaran anggaran sektor publik jika masih menginginkan proses pembangunan manusia di Provinsi DIY berjalan secara berkelanjutan; dan 2) pemerintah harus memberikan alokasi anggaran sektor publik (pendidikan dan kesehatan) yang langsung dapat dinikmati masyarakat sehingga akan mampu meningkatkan indeks pendidikan dan indeks kesehatan, seperti pembebasan sumbangan pembiayaan pendidikan, pembebasan uang pangkal sekolah, dan fasilitas pendidikan yang langsung dinikmati masyarakat. Tuntutan tersebut juga berlaku untuk pelayanan kesehatan secara terpadu dan murah dan perluasan dan penyederhanaan fasilitas Asuransi Keluarga Miskin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anand, Sudhir and Martin Ravallion. (1993). "Human Development in Poor Countries: On the Role of Private Incomes and Public Services". *The Journal of Economic Perspectives*. Vol. 7. No. 1 (Winter, 1993):133-150.
- Azril. (2000). "Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 15. No.1, 2000:1-14.
- Badrudin, Rudy. (2010). "Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Pasca Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol. 21. No. 3, Desember 2010: 243-263.
- BPS. (2005). *Laporan Keuangan Provinsi DIY Tahun 2005*. BPS Provinsi DIY.
- BPS. (2006). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman, Tahun 2006*. BPS Kabupaten Sleman.
- Delavallade, Clara. (2006). "Corruption and Distribution of Public Spending in Developing Countries". *Journal of Economics and Finance*. Vol. 30. No. 2: 222-239.
- Fery, Adrianus. (2002). "Analisis Pengeluaran Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. Vol 1. No. 2, Mei 2002: 113-119.
- Gujarati, Damodar. (1995). *Ekonometri Dasar*. Erlangga, Jakarta.
- Hirawan, Susiyati Bambang. (2007). *Desentralisasi Fiskal sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*. Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap

dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Khasanah, Mufidhatul. (2007). "Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Kasus APBD Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo, Tahun 2004 dan 2005". *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. Vol 18. No. 1, April 2007:43-50.
- Sahrah, Alimartus. (2007). *Memberdayakan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kualitas Bangsa*. Pidato Dies Natalis Unwama ke XXI, Yogyakarta.
- Sasana, Hadi. (2009). "Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Terakreditasi. Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 10. No.1, Juni 2009:103 – 124.
- Suhab, Sultan. (2004). "Kebijaksanaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah". *Analisis*. Vol. 1. No. 2:106-114.
- Suparto. (2005). Pengaruh Variabel Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1999-2002. *Tesis*. Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.
- Wibowo, Puji. (2008). "Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah". *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 5. No. 1, Oktober 2008:55 – 83.